



RENCANA KERJA BAPPEDA & LITBANG TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Kami menyadari dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 ini disusun belum optimal. Harapannya dokumen ini menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional dan kinerja yang profesional. Melalui dokumen ini, Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau mencoba merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan untuk pembangunan yang berazaskan keadilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Malinau, 7 Maret 2023
Kepala Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau

Drs. Agustinus, M.AP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670217 199312 1 001



DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	19
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
Perangkat Daerah	36
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten	36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	45
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	45
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	46
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	56
BAB V PENUTUP	59



DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 6.1 Jumlah Proyeksi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau, 2017-2019	15
Tabel 6.2 Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Malinau, 2015-2019	16
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Malinau	21
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau	35
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau	37
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	44
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2023 Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau	47
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Malinau	50
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda dan Litbang Tahun 2024.....	57



PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2024 merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja Bappeda dan Litbang ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Renja Perangkat Daerah bertujuan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Bappeda dan Litbang dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai tupoksinya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada



evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2024, adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun



2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;

- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 8) Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 9) Kepmen Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 10) Surat Edaran Bupati Malinau Nomor 050.4/56/Hukum tanggal 4 Maret 2022 tentang Pedoman Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- 11) Peraturan Bupati Malinau Nomor 28.1 Tahun 2021 tanggal 14 November 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026
- 12) Peraturan Bupati Malinau Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dan arah kebijakan bagi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau selama tahun 2024.

b. Tujuan

Penyusunan Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau tahun



Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2024

2024 bertujuan memperlancar tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Malinau di bidang perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat



Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2024

menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah,
tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP



HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Malinau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang data, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, prasarana dan pengembangan wilayah, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan, pembiayaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bappeda dan Litbang mempunyai fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning). Mengacu pada Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

1. Politik;
2. Teknokratik;
3. Partisipatif;
4. Atas-bawah (top-down); dan
5. Bawah-atas (bottom-up)

Berdasarkan pendekatan politik, telah dilakukan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan damai. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Bappeda dan Litbang selaku institusi perencana menyiapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dan program prioritas daerah, yang kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Melalui pendekatan teknokratik, Bappeda dan Litbang melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD dan penyusunan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kewenangan. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh organisasi yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan



menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan, dan Desa yang lebih dikenal dengan Musrenbang Daerah. Pendekatan Top Down-Bottom Up dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah ke atas (bottom up) merupakan pendekatan perencanaan yang mengikuti kebutuhan nyata, sementara dari atas ke bawah (top down) menerapkan penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “di bawah” adalah penjabaran rencana induk yang berada “di atas”. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis di berbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan dari “atas ke bawah” memberikan gambaran tentang perkiraan dan kemungkinan yang ada dan diinformasikan secara berjenjang sehingga proses perencanaan “dari bawah ke atas” diharapkan sejalan dengan “dari atas ke bawah”, begitu pula sebaliknya, perencanaan “dari atas ke bawah” juga harus memperhatikan perencanaan “daribawah ke atas” yang merupakan identifikasi kebutuhan riil masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud, disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

1. Penyusunan rencana;



2. Penetapan rencana;
3. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana;

Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah.

Langkah pertama, adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.

Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

Langkah ketiga, adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Langkah keempat, adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh organisasi Bappeda dan Litbang.

Selanjutnya Kepala Bappeda dan Litbang menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan organisasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya.



Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Bappeda dan Litbang berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Dalam rangka menjamin perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 dibentuk Bappeda dan Litbang, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang dan berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Malinau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, mempunyai:

1. Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
 - e. Bidang Ekonomi;
 - f. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - g. Bidang Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan;



- i. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang terdiri atas:
 - a. Subbagian Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Subbagian Penyusunan Program;
3. Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
 - a. Subbidang Pengelolaan Data Spasial;
 - b. Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah;
 - c. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
 - a. Subbidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
 - b. Subbidang Pengembangan Wilayah, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
 - c. Subbidang Keciaptakarya dan Pengairan;
5. Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
 - a. Subbidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - b. Subbidang Perekonomian dan Pariwisata;
 - c. Subbidang Ketenagakerjaan dan Investasi;
6. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
 - a. Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 - c. Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Bidang Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:

- a. Subbidang Pembiayaan Pembangunan Daerah;
- b. Subbidang Penelitian;
- c. Subbidang Pengembangan;

Tatalaksana Bappeda dan Litbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Pembinaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk pelaksanaan tugas tersebut telah dilengkapi dengan tata laksana berupa tahapan dan mekanisme baku. Tata laksana yang disusun dan diterapkan terdiri dari 2 aspek, yaitu internal dan eksternal. Tata laksana internal berupa tahapan dan mekanisme yang diberlakukan dalam pelaksanaan tugas di lingkup instansi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau. Sedangkan tata laksana eksternal kaitannya dengan pihak lain di luar Bappeda dan Litbang, baik itu antar OPD, masyarakat luas dan pihak-pihak lain yang menjadi *stakeholder* dan *shareholder* aspek perencanaan daerah.

1. Tata Laksana Internal

Untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan internal dengan tahapan dan mekanisme baku, Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau telah menyusun dan menerapkan SOP yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,



keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Tata Laksana Eksternal

Untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan eksternal dengan berbagai pihak, sesuai dengan tahapan dan mekanisme baku, Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau telah menyusun dan menerapkan SOP eksternal. Sedangkan untuk melaksanakan tugas yang terkait dengan penyediaan dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, telah mengacu pada peraturan perundangan, juklak dan juknis yang ada.

Berdasarkan penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau 2021-2026 maka dokumen tersebut menjadi dokumen yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dikordinasikan oleh Bappeda dan Litbang. Hal ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan rencana penataan ruang wilayah di Kabupaten Malinau, berdasarkan struktur ruang dan pola ruang wilayah.

Dengan mempertimbangkan sinergi rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta mengantisipasi pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan yang diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan di wilayah timur, maka arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Malinau periode tahun 2021-2026 diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan strategis yang merupakan kawasan yang diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting di lingkup nasional, provinsi dan kabupaten. Kawasan strategis tersebut di Kabupaten Malinau terdiri atas:

1. Kawasan Strategis Nasional, yang terdiri atas: (1) kawasan perbatasan darat RI dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur); dan (2) kawasan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo).
2. Kawasan Strategis Provinsi, yang ada di Kabupaten Malinau adalah Long Nawang dan kawasan sekitarnya yang akan dikembangkan untuk



mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal perbatasan dan pedalaman.

3. Kawasan Strategis Kabupaten, yang terdiri atas: (1) kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan ekonomi (Perkotaan Malinau, Long Nawang, Kecamatan Malinau Utara dan Kecamatan Mentarang); (2) Kawasan Strategis Kabupaten untuk kepentingan sosial budaya (pusat pemerintahan Kabupaten Malinau, kawasan warisan budaya di Kecamatan Bahau Hulu, Kayan Hilir, Kayan Hulu dan Sungai Boh); (3) Kawasan Strategis Kabupaten untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam (pertambangan batubara di Kecamatan Malinau Selatan); dan (4) Kawasan Strategis Kabupaten untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup (Taman Nasional Kayan Mentarang).

Selain itu, arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Malinau diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah desa dan wilayah kecamatan.

1. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Desa/Kelurahan

Dengan memperhatikan program-program yang dicanangkan, meliputi Program Desa Sarjana, Program Milenial Mandiri, Program Rasda PLUS, Program RT Bersih dan Program WM Malinau Maju, maka strategi pembangunan wilayah desa di Kabupaten Malinau secara umum adalah “peningkatan kemandirian, kedamaian dan kesejahteraan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi di desa”. Strategi umum tersebut dijabarkan dalam strategi khusus sebagai berikut; (1) pengembangan potensi dan karakteristik keunggulan desa/kelurahan; (2) peningkatan ketahanan pangan; (3) peningkatan ketahanan terhadap bencana akibat perubahan iklim; (4) peningkatan kewirausahaan desa; dan (5) peningkatan konektivitas desa.

Arah kebijakan pembangunan wilayah desa/kelurahan antara lain adalah: (1) meningkatkan kapasitas aparat desa; (2) mengembangkan SDM sesuai kebutuhan desa; (3) meningkatkan produktivitas tanaman pangan melalui pemberdayaan masyarakat (pendampingan, pembinaan,



penyuluhan, pelatihan, kursus, magang); (4) meningkatkan upaya adaptasi dan mitigasi bencana; (5) membangun sarana prasarana dasar dan ekonomi, (6) mengembangkan ekonomi kreatif berbasis potensi dan kearifan lokal pedesaan.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kecamatan

Strategi pembangunan wilayah kecamatan meliputi: (1) pengembangan kawasan strategis pusat pengembangan kegiatan lokal yang unggul dan berdaya saing; (2) peningkatan koordinasi pembangunan wilayah desa/kelurahan; (3) peningkatan ketahanan pangan; (4) pengembangan inovasi dan keunggulan kecamatan; (5) peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim; serta (6) peningkatan konektivitas antar desa dan antar kecamatan. Oleh karenanya, arah kebijakan pembangunan wilayah kecamatan antara lain: (1) meningkatkan kapasitas aparat kecamatan; (2) membangun dan mengembangkan prasarana kewilayahan; (3) membangun dan mengembangkan prasarana dasar; (4) membangun dan mengembangkan prasarana ekonomi; (5) mengembangkan ekonomi kreatif berbasis keunggulan desa; (6) memperluas kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan.

Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang. Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Malinau, Baappeda dan Litbang.

Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan perangkat daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Renja Perangkat Daerah merupakan



perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Malinau merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD disempurnakan berdasarkan rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi. Verifikasi Renja Perangkat Daerah dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan rancangan awal RKPD. Untuk itu dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektifitas dan efisiensi perencanaan di Kabupaten Malinau sehingga dapat menghasilkan Renja Perangkat daerah yang berkualitas.

Perkembangan kondisi kependudukan mencerminkan dinamika pembangunan daerah yang diukur dari tingkat kelahiran, kematian dan mutasi penduduk, serta penyebaran penduduk di Kabupaten Malinau akan sangat penting dalam merumuskan langkah-langkah yang terbaik. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim BPS 2021-2023, jumlah penduduk di Kabupaten Malinau pada tahun 2022 adalah sebanyak 83,80 ribu jiwa. Bila dilihat dari tempat tinggalnya penduduk Malinau mayoritas berasal dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu Malinau Kota, Malinau Barat dan Malinau Utara.

Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah pemekaran Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999. Kabupaten Malinau terletak di bagian utara sebelah barat Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, yaitu Negara Bagian Serawak dan Sabah di sebelah Barat. Batas wilayah Kabupaten Malinau, yaitu sebelah Utara dengan Kabupaten Nunukan, sebelah Timur dengan Kabupaten Tana Tidung dan Bulungan, sebelah Selatan dengan Kabupaten Kutai Barat, dan sebelah Barat dengan Negara Malaysia Timur-Serawak.

Kabupaten Malinau dengan luas wilayah 40.088,48 km², terletak antara 114°35'22" sampai dengan 116°50'55" bujur timur dan 1°21'36" sampai dengan 4°10'55" lintang utara. Kondisi geografis Kabupaten Malinau bervariasi



berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Secara umum untuk daerah datar (0-2 %) seluas 107,89 ha; bergelombang (2-15 %) seluas 70,66 ha; curam (15-40%) seluas 1.957,96 ha; sedangkan sangat curam (>40%) seluas 10.861,89 ha, dengan ketinggian diatas permukaan laut 7 - 1.000 m.

Daerah aliran sungai terdapat dataran rendah khususnya di Kecamatan Malinau sepanjang kiri dan kanan Sungai Malinau, Sungai Simendurut, Sungai Sembuak dan Sungai Salap dan sebagian kecamatan di sekitar ibukota Kecamatan Mentarang. Selanjutnya kawasan perbukitan terjal terdapat di sebelah Utara Bagian Barat, perbukitan sedang di bagian Tengah dan dataran bergelombang landai di bagian Timur. Perbukitan terjal di sebelah Utara bagian Barat merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian 1.500 m - 3.000 m di atas permukaan laut, sedangkan perbukitan di sebelah Selatan bagian Tengah ketinggiannya berkisar antara 500 m - 1.500 m di atas permukaan laut.

Tema Rancangan awal RKPD tahun 2024 yaitu ***“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastruktur yang Mendukung Penguatan Ekonomi Menuju Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan”***, dengan prioritas pembangunan tahun 2024 adalah:

1. Menurunkan angka kemiskinan
2. Penguatan Perekonomian Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi
3. Meningkatkan daya saing SDM melalui inovasi dan peningkatan SDM
4. Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi
5. Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
7. Menciptakan suasana Kondusif yang mendukung Sumber Daya Manusia.

Bappeda dan Litbang Tahun 2024 berpedoman pada prioritas



pembangunan ***“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik”*** yang menjadi isu strategis dalam pemilihan program prioritas ini karena ***Tuntutan Publik Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik***.

Program pendukung prioritas Bappeda dan Litbang 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel
Program Prioritas Pembangunan
Bappeda dan Litbang Tahun 2023

OPD	Prioritas Pembangunan 2023	Program
Bappeda dan Litbang	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. Program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
		2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
		3. Program penelitian dan pengembangan daerah

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Renja Bappeda dan Litbang Malinau merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang telah diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, karena evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program maka diharapkan kebijakan kedepannya akan lebih baik. Selain dari pada itu evaluasi juga untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, point selanjutnya evaluasi kebijakan digunakan untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik, karena dengan melakukan penilaian kinerja suatu



Rencana Kerja
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau
Tahun 2024

kebijakan maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban



Pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program Pemerintah. Lebih lanjut dapat disampaikan evaluasi kebijakan dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang.

Demikian dapat dimaknai secara umum Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Tahun 2024 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional yang tertuang dalam Renstra Bappeda dan Litbang. Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan.

Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau pada Tahun 2023 memuat 4 (Empat) program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.512.777.659. Berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda dan Litbang dan pencapaian Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau sampai dengan tahun berjalan disajikan pada tabel 2.1 (T-C.29)



Rencana Kerja
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau
Tahun 2024

Tabel 2.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Malinau

Nama Perangkat Daerah : Bappeda dan Litbang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda dan Litbang) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.01	PERENCANAAN									
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
5.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	56	46	-	-	-	49	49	100%
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	74%	74%	100%	100%	100%
5.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan	Jumlah Kotak Makanan dan	1507 kotak	270	210	210	100%	900	900	100%



Rencana Kerja
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau
Tahun 2024

	Logistik Kantor	Minuman								
5.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Fotocopy	2 jenis	2	-	-	-	2	2	100%
5.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang Diikuti	50 Laporan	60	50	24	48%	6	6	100%
5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki	3 jenis	2	-	-	-	4	4	100%
5.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	41 jenis	17	33	33	100%	41	41	100%
5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Diservice	6 unit	8	8	8	100%	6	6	100%
5.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Penyusun Dokumen Perencanaan	-	-	-	-	-	100%	100%	100%



Rencana Kerja
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau
Tahun 2024

5.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-	56	56	100%
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara Konsultasi Publik	1 BA	-	-	-	-	2	2	100%
5.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah berita acara Forum perangkat daerah/Lintas perangkat daerah	43 BA	-	-	-	-	1	1	100%
5.01.02.2.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara musrenbang kab/kota	1 BA	420	800	800	100%	420	420	100%
5.01.02.2.01.07	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah kab/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dok	2	2	2	100%	3	3	100%
5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Rencana Kerja
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau
Tahun 2024

5.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	-	-	-	-	-	50	50	100%
5.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	1 buku	50	1	1	100%	50	50	100%
5.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil pembangunan Daerah yang diterbitkan	1 buku	35	35	35	100%	20	20	100%
5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Renstra dan RPJMD 2021-2026	-	-	-	-	-	1	1	100%
5.01.02.2.03.02	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya	12 laporan	1	1	1	100%	12	12	100%



Rencana Kerja
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau
Tahun 2024

5.01.02.2.03.03	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Hasil kinerja pembangunan daerah	12 laporan	-	12	12	100%	12	12	100%
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Rencana Kerja
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau
Tahun 2024

		Perencanaan Pembangunan Daerah								
5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD,RKPD)	19 kali	25	25	25	100%	19	19	100%
5.01.03.2.01.02	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	34 PD	-	-	-	-	34	34	100%
5.01.03.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	1 laporan	1	1	1	100%	1	1	100%
5.01.03.2.01.06	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan hasil sinkrinisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan Manusia	15 PD	-	-	-	-	8	8	100%



Rencana Kerja
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau
Tahun 2024

5.01.03.2.01.07	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan renstra/renja bidang pembangunan manusia	PD	-	1	1	100%	1	1	100%
-----------------	---	--	----	---	---	---	------	---	---	------



Rencana Kerja
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau
Tahun 2024

	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dikoordinir penyusunannya (RPJPD,RPJMD,RKPD)	20 kali	3	12	12	100%	20	20	100%
5.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam Penyusunan renstra/renja Bidang Perekonomian	PD	-	-	-	-	8	8	100%
5.01.03.2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian	Laporan	-	-	-	-	1	1	100%
5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Rencana Kerja
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau
Tahun 2024

5.01.03.2.03.02	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur	22 PD	-	-	-	-	6	6	100%
-----------------	--	---	-------	---	---	---	---	---	---	------



Rencana Kerja
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau
Tahun 2024

5.01.03.2.03.05	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan	1 laporan	5	25	25	100%	25	25	100%
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%
5.05.02.2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah	-	100%	-	-	-	100%	100%	100%
5.05.02.2.04.04	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Jumlah OPD yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Inovasi	-	1	-	-	-	56	56	100%



Berdasarkan tabel diatas diketahui hasil review terhadap rencana kerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, target capaian 100% dan realisasi capaian 97,19%
 - Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, target capaian 100% dan realisasi capaian 93,78%
 - Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, target capaian 100% dan realisasi capaian 80,37%

Hasil analisis menunjukan bahwa tingkat pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau sampai dengan tahun 2022 hasilnya adalah sebagai berikut:

a. Kinerja Fisik

Target fisik Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau adalah sebesar 100% sedangkan realisasinya adalah sebesar 100%

b. Kinerja Keuangan

Target dan realisasi keuangan pada belanja operasi dan belanja modal sampai dengan tahun 2022 dapat diinformasikan bahwa target keuangan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau adalah sebesar 100% sedangkan realisasinya adalah sebesar 85,31%

Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau pada Tahun 2022 memuat 4 (Empat) program dan 12 (Dua Belas) kegiatan dan 22 (Dua Puluh dua) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. **11.512.777.659**, dengan realisasi anggaran Rp **9.135.358.244**, atau terealisasi **85,31%**, yang artinya ada efisiensi dan efektifitas atau sebab lainnya sebesar **14,69%** dan secara rata-rata telah memenuhi target kinerja



hasil/keluaran yang direncanakan, Belanja Operasi sebesar Rp **11.443.267.659** dengan realisasi Rp **9.065.878.244** atau sebesar **(79,96%)** dan Belanja Modal sebesar **Rp 69.510.0000** dengan realisasi Rp **69.480.0000** atau sebesar **(99,96%)**

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan urusan di bidang perencanaan, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian dengan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan, peraturan tersebut merupakan acuan dasar dan pedoman bagi Bappeda dan Litbang untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malinau secara umum dan khususnya pada ruang lingkup Bappeda dan Litbang dalam rangka mencapai target kinerja dan capaian kinerja pada sasaran strategis dan indikator sasaran strategis bidang-bidang yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari bidang-bidang di Bappeda dan Litbang.

Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan-pelayanan publik dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM DALAM RKPD KEDALAM RPJMD TAHUN BERKENAAN

Indikator ini adalah cara menilai kualitas dokumen RKPD yang dapat dilihat dari konsistensi antara dokumen RKPD terhadap



dokumen RPJMD. Konsistensi dokumen RKPD diuji dengan membandingkan antara jumlah program yang disusun dalam RKPD dengan jumlah program RPJMD sehingga hasil yang diharapkan adalah jumlah program RKPD tidak melebihi dari jumlah program pada RPJMD. Dokumen RKPD adalah tolok ukur perangkat daerah dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah sehingga kualitas RKPD sangat menentukan Bappeda dan Litbang dalam rangka mencapai sasaran strategis yaitu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Pada tahun 2022 jumlah program dalam RKPD sebanyak 216 program dengan jumlah program dalam RPJMD sebanyak 201 program, maka persentase program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD sebesar 102,85%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 100%, maka capaian kinerja indikator ini sebesar 80,24%

2. PERSENTASE CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KABUPATEN

Indikator ini adalah cara untuk menganalisis persentase capaian target kinerja SKPD dengan cara menghitung jumlah OPD yang memperoleh nilai sangat tinggi dari hasil evaluasi renja dibandingkan dengan jumlah OPD yang dievaluasi. Persentase pencapaian hasil pembangunan daerah harus didasarkan pada hasil evaluasi dokumen rencana kerja perangkat daerah dengan demikian data dan informasi realisasi capaian kinerja anggaran dan realisasi penggunaan anggaran pembangunan yang akurat dapat dilaporkan secara akuntabel dan transparan. Alasan dibutuhkannya pengendalian, evaluasi dan pelaporan adalah untuk mengetahui permasalahan dan solusi, dengan demikian hasil yang diharapkan sajian data dan informasi tentang capaian kinerja perangkat daerah dari evaluasi renja perangkat daerah dengan kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Pada tahun 2022 jumlah OPD yang memperoleh nilai sangat tinggi



Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2024

sebanyak 61 OPD dan jumlah OPD yang dievaluasi sebanyak 74 OPD, maka persentase capaian target kinerja SKPD sebesar 88,37%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 100%, maka capaian kinerja indikator ini sebesar 88,37%.

Maka tujuan Bappeda dan Litbang untuk mencapai sasaran strategis Bappeda dan Litbang dalam rangka untuk meningkatkan konsistensi perencanaan dengan penganggaran pembangunan daerah tercapai melalui kedua indikator kinerja dengan formulasi yang disusun dengan dukungan anggaran dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung dan komitmen bidang-bidang urusan perencanaan yang bertugas untuk memverifikasi dan memvalidasi dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah.

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda dan Litbang Tahun 2022												
1	Persentase konsistensi program RKPD kedalam RPJMD tahun berkenaan			100	80	85	90	-	107,46	-	-	
2	Persentase capaian indicator kinerja kabupaten			100	80	85	90	-	211,81	-	-	
3	Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan			100	80	85	90	-	-	-	-	
4	Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah			100	80	85	90	-	-	-	-	
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda dan Litbang Tahun 2023												
7	Persentase konsistensi program RKPD kedalam RPJMD tahun berkenaan			80	100	100	100	-	-	100	100	
8	Persentase capaian indicator kinerja kabupaten			80	80	85	90	-	-	85	90	
9	Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan			80	80	85	90	-	-	85	90	
10	Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah			80	80	85	90	-	-	85	90	

Bappeda dan Litbang Kab. Malinau



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan analisis gambaran umum Bappeda dan Litbang, maka dirumuskan permasalahan pembangunan Jangka Menengah Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau yaitu:

1. Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Belum dijadikan Bahan Pertimbangan Kebijakan Perencanaan Berikutnya
3. Belum Optimalnya Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan

Dari hasil analisis capaian kinerja disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang adalah **Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026 Perumusan Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Malinau yaitu **“Belum Optimalnya Kinerja Pembangunan Kabupaten Malinau”** yang disebabkan oleh karena **“Belum Primanya Tata Kelola Pemerintahan”** dan mengakibatkan **“Keuangan Daerah yang Belum Efisien/Efektif”** maka pelayanan dan analisis isu strategis tersebut menjadi dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan perangkat daerah di masa datang. Karena itu, dalam menentukan isu-isu strategis yang terkait



dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau tidak bisa dilepaskan dari lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal.

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara serta telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Malinau dan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau sebagai berikut:

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen perencanaan yang konsisten
2. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah
3. Peningkatan kualitas inovasi daerah
4. Implementasi rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten

Rancangan awal RKPD Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel 2.4 (T-C.31)



Tabel 2.4 (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Malinau

Nama Perangkat Daerah: Bappeda dan Litbang

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Malinau	Rata-rata Capaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	10.868.300.800	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Malinau	Rata-rata Capaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	10.868.300.800	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Malinau	Persentase Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	9.587.539.900	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Malinau	Persentase Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	9.587.539.900	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Malinau	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	54 orang	9.587.539.900	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Malinau	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	54 orang	9.587.539.900	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Malinau	Persentase Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	1.187.310.400	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Malinau	Persentase Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	1.187.310.400	
	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Malinau	Jumlah peserta pendidkan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	56 orang	1.187.310.400	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Malinau	Jumlah peserta pendidkan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	56 orang	1.187.310.400	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Malinau	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.030.760.009	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Malinau	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.030.760.009	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Malinau	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 Paket	250.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Malinau	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 Paket	250.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Malinau	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	1 Paket	100.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Malinau	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	1 Paket	100.000.000	



	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Malinau	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 jns	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Malinau	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 jns	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Malinau	Jumlah partisipasi rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 Laporan	680.760.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Malinau	Jumlah partisipasi rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 laporan	680.760.009	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Malinau	Jumlah aplikasi sistem pemerintahan yang dapat digunakan	1 aplikasi	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Malinau	Jumlah aplikasi sistem pemerintahan yang dapat digunakan	1 aplikasi	-	



Rencana Kerja
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau
Tahun 2024

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Malinau	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	150.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Malinau	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	150.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Malinau	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	8 Unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Malinau	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	8 Unit	150.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Malinau	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	41 jns	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Malinau	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	41 jns	-	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Malinau	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Malinau	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Malinau	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang pemeliharaan dan pajak kendaraan dibayarkan	6 unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Malinau	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang pemeliharaan dan pajak kendaraan dibayarkan	6 unit	100.000.000	
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Malinau	Rata-rata Capaian Pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	1.432.184.500	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Malinau	Rata-rata Capaian Pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	1.432.184.500	
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Malinau	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	80%	975.0000.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Malinau	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	80%	975.0000.000	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Malinau	Jumlah berita acara konsultasi publik	1 Berita Acara	100.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Malinau	Jumlah berita acara konsultasi publik	1 Berita Acara	100.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Malinau	Jumlah berita acara forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	43 Berita Acara	150.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Malinau	Jumlah berita acara forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	43 Berita Acara	150.000.000	



Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2024

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Malinau	Jumlah berita acara musrenbang kabupaten/kota	1 Berita Acara	325.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Malinau	Jumlah berita acara musrenbang kabupaten/kota	1 Berita Acara	325.000.000	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Malinau	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 dok	400.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Malinau	Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perkada	4 dok	400.000.000	
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Malinau	Persentase analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	80%	100.000.000	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Malinau	Persentase analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	80%	100.000.000	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Malinau	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	43 PD	50.000.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Malinau	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	43 PD	50.000.000	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Malinau	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	1 buku	50.000.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Malinau	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	1 buku	50.000.000	
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Malinau	Persentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah	80%	225.000.000	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Malinau	Persentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah	80%	225.000.000	
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Malinau	Jumlah laporan monitoring evaluasi dana DAK, Bantuan Keuangan, TP dan Tepra	12 laporan	-	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Malinau	Jumlah laporan monitoring evaluasi dana DAK, Bantuan Keuangan, TP dan Tepra	12 laporan	-	



Rencana Kerja
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau
Tahun 2024

	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Malinau	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	22 laporan	225.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Malinau	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	22 laporan	225.000.000	
--	--	---------	--	------------	-------------	--	---------	--	------------	-------------	--



Rencana Kerja
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau
Tahun 2024

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Malinau	Rata-rata Capaian Pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	80%	749.999.205	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Malinau	Rata-rata Capaian Pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	80%	749.999.205	
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Malinau	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	80%	270.000.000	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Malinau	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	80%	270.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Malinau	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	4 Lap	-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Malinau	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	4 Lap	-	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Malinau	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	15 PD	20.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Malinau	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	15 PD	20.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Malinau	Jumlah data pendukung pelaporan pelaksanaan dokumen APBDes	7 kec	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Malinau	Jumlah data pendukung pelaporan pelaksanaan dokumen APBDes	7 kec	-	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Malinau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	1 laporan	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Malinau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	1 laporan	-	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Malinau	Jumlah dokumen OPD yang diasistensi bidang pembangunan manusia	8 opd	-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Malinau	Jumlah dokumen OPD yang diasistensi bidang pembangunan manusia	8 opd	-	



Rencana Kerja
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau
Tahun 2024

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Malinau	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang pemabngunan manusia	4 Laporan	250.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Malinau	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang pemabngunan manusia	4 Laporan	250.000.000	
4	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Malinau	Rata-rata Capaian Pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	80%	230.000.000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Malinau	Rata-rata Capaian Pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	80%	230.000.000	
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Malinau	Persentase koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	80%	250.000.000	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Malinau	Persentase koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	80%	250.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Malinau	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dok	120.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Malinau	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dok	120.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Malinau	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang pemabngunan manusia	7 PD	30.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Malinau	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang pemabngunan manusia	7 PD	30.000.000	



	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Malinau	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang perekonomian	7 PD	100.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Malinau	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang perekonomian	7 PD	100.000.000	
5	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Malinau	Rata-rata Capaian Pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	80%	325.000.000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Malinau	Rata-rata Capaian Pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	80%	325.000.000	



Rencana Kerja
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau
Tahun 2024

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Malinau	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	80%	250.000.000	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Malinau	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	80%	250.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Malinau	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang infrastruktur	21 PD	30.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Malinau	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang infrastruktur	21 PD	30.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Malinau	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	1 dok	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Malinau	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	1 dok	-	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Malinau	Jumlah dokumen OPD yang diasistensi bidang kewilayahan	11 dok	-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Malinau	Jumlah dokumen OPD yang diasistensi bidang kewilayahan	11 dok	-	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Malinau	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	1 dok	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Malinau	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	1 dok	-	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Malinau	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur	1 lap	220.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Malinau	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur	1 lap	220.000.000	
6	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Malinau	Rata-Rata Capaian Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	80%	250.000.000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Malinau	Rata-Rata Capaian Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	80%	250.000.000	



Rencana Kerja
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau
Tahun 2024

	<i>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang</i>	Malinau	Persentase Data Hasil Penelitian dan	80%	250.000.000	<i>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang</i>	Malinau	Persentase Data Hasil Penelitian dan	80%	250.000.000	
--	--	---------	--------------------------------------	-----	-------------	--	---------	--------------------------------------	-----	-------------	--



Rencana Kerja
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau
Tahun 2024

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<i>Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>		Pengembangan yang Diakses Ke Website			<i>Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>		Pengembangan yang Diakses Ke Website			
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Malinau	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik	1 Lap	250.000.000	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Malinau	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik	1 Laporan	250.000.000	
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Malinau	Persentase Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah	80%	-	<i>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	Malinau	Persentase Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah	80%	-	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Malinau	Jumlah hasil kelitbangan yang dilakukan diseminasi	1 tema	-	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Malinau	Jumlah hasil kelitbangan yang dilakukan diseminasi	1 tema	-	
JUMLAH					13.488.299.909	JUMLAH					13.488.299.909



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Bappeda dan Litbang didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di tingkat Kecamatan.

Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda dan Litbang selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD Kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil



TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang dimaksud merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional jangka panjang maupun jangka menengah. RPJMN 2020-2024 merupakan tahap keempat dari tahapan RPJPN 2005-2025 yang memuat penetapan target Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024 dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional). Kementerian PPN/Bappenas merupakan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional berkewajiban untuk mengawal tercapainya sasaran dan target kedua hal tersebut.

Pencapaian Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024 dapat tercapai melalui pelaksanaan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan. Setiap Agenda Pembangunan memiliki sasaran, indikator dan target pembangunan sampai dengan akhir tahun 2024. Dalam melaksanakan agenda pembangunan (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024 ditetapkan pula 41 Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). *Major Project* merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional.

Untuk mempercepat pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, maka Kementerian PPN/Bappenas penetapan dukungan pengarusutamaan (*mainstreaming*) di dalam RPJMN 2020-2024 yang terdiri atas 4 (empat) pengarusutamaan sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang



berkeadilan dan adaptif, yang sekaligus menjiwai seluruh pembangunan sektor dan wilayah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Keempat pengarustamaan tersebut adalah:

1. *Pembangunan Berkelanjutan*, yang menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. *Gender*, yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan.
3. *Modal Sosial dan Budaya*, yang dimaksudkan sebagai strategi internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.
4. *Transformasi Digital*, yang terus mengalami perkembangan, khususnya teknologi digital yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga perlu penyesuaian dengan pembangunan nasional.

Berdasarkan rencana strategis Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 terdapat tiga tujuan utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2020-2024, dirumuskan sasaran strategis disertai



dengan indikator sasaran yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Kementerian PPN/Bappenas, untuk lima tahun ke depan yaitu:

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama:
Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional, yang diukur dari indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua:
Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner, yang diukur dari indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L dan Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L.
3. Sasaran strategis untuk tujuan ketiga:
Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM, yang diukur dari indikator:
 - Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas
 - Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau untuk



mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan.

Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa yang akan datang yang akan berpengaruh langsung pada tujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang, serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau. Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya.

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka tujuan tersebut di atas selanjutnya diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran beserta indikator sasaran.

Adapun tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja Bappeda dan Litbang berdasarkan renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Bappeda dan Litbang 2021-2026
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
2. Sasaran Bappeda dan Litbang
 - Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah
 - Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan



Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2023
Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD tahun berkenaan	100%
			Persentase capaian Indikator Kinerja kabupaten	85%
		Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan	Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan	85%
			Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah	85%

Bila dibandingkan dengan hasil evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah pada tahun 2021, tujuan Bappeda dan Litbang adalah sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2022
Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase program RKPD kedalam RPJMD tahun berkenaan	100%	107,46%
			Persentase capaian indikator kinerja kabupaten	100%	211,81%

Tujuan Bappeda dan Litbang pada rencana kerja 2022 yaitu meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator rata-rata pencapaian sasaran RPJMD



3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan tahun 2024 disusun dengan mengacu pada hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah tahun 2023. Selain itu, hasil capaian indikator sasaran kinerja tersebut telah selaras dengan indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026, baik sebagai indikator utama maupun pendukung. Dalam penyusunan program dan kegiatan Rencana Kerja Bappeda dan Litbang berpedoman pada arah dan kebijakan nasional yang terdapat pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas, baik tujuan, sasaran serta indikator kinerja yang menjadi prioritas nasional. Disamping itu, dalam perumusan program dan kegiatan tersebut juga mengacu pada arah dan kebijakan Provinsi Kalimantan Utara dengan berpedoman pada Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan tema pembangunan daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 yakni ***"Peningkatan Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastruktur yang Mendukung Penguatan Ekonomi Menuju Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan"***, maka yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kemiskinan



2. Penguatan ekonomi lokal dan iklim investasi untuk pemulihan ekonomi
3. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM untuk menghadapi persaingan global
4. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung peran dan daya saing daerah
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
6. Meningkatnya penataan kawasan desa yang rapi, tertib, bersih, sehat, indah dan harmonis yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup

Prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pengembangan dan penguatan industri primer seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan pertambangan
2. Pengembangan dan penguatan industri pengolahan
3. Pengembangan dan penguatan industri ketenagalistrikan
4. Pengembangan dan penguatan industri perdagangan dan jasa
5. Pengembangan dan penguatan industri pariwisata dan ekonomi kreatif
6. Pengembangan dan penguatan industri kecil dan menengah dan industri lainnya

Prioritas pembangunan nasional dalam rancangan RKP Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya



saing;

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Dalam Renja tahun 2024 ini, Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau merencanakan 4 (Empat) program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) sub kegiatan, dengan jumlah total pagu indikatif sebesar Rp 13.488.299.909, dengan lokasi kegiatan terpusat di wilayah Kabupaten Malinau dan luar daerah Kabupaten Malinau. Dari total pagu indikatif tersebut, seluruhnya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024.

Berikut disajikan pada Tabel 3.3 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 sebagai berikut:



TABEL T-C. 33
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6		7	8	9
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Capaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Malinau	100%	11.116.545.609	APBD		100%	11.116.545.609
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Malinau	100%	9.488.299.909	APBD		100%	9.587.539.900
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Malinau	54 org	9.488.299.909	APBD		54 org	9.587.539.900
5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Malinau	100%	300.000.000	APBD		100%	300.000.000
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	Malinau	56 org	300.000.000	APBD		56 org	300.000.000
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Malinau	100%	1.250.760.009	APBD		100%	1.250.760.009
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Malinau	1 Paket	250.000.000	APBD		1 Paket	250.000.000
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Malinau	1 Paket	100.000.000	APBD		1 Paket	100.000.000
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapatkoordinasi dan konsultasi SKPD	Malinau	50 Lap	680.760.009	APBD		50 Lap	680.760.009
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dukungan pelaksanaan system pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	Malinau	1 aplikasi	70.000.000	APBD		1 aplikasi	70.000.000



Rencana Kerja
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau
Tahun 2024

5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Malinau	100%	150.000.000	APBD			150.000.000
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Malinau	8 Unit	-	APBD		8 Unit	-
5.01.01.2.0.8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	Malinau	1 Paket	150.000.000	APBD		-	150.000.000-
5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Malinau	100%	100.000.000	APBD			100.000.000
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas jabatanyang pemeliharaan dan pajak kendaraan dibayarkan	Malinau	6 unit	100.000.000	APBD		6 unit	100.000.000
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata Capaian Pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Malinau	100%	1.400.000.000	APBD		100%	1.400.000.000
5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	Malinau	100%	1.075.000.000	APBD		100%	1.075.000.000
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	Malinau	1 BA	100.000.000	APBD		1 BA	100.000.000
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah berita acara forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	Malinau	43 BA	150.000.000	APBD		43 BA	150.000.000
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara musrenbang yang hadir	Malinau	1 BA	325.000.000	APBD		1 BA	325.000.000
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kab/kota yang ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Malinau	4 dok	500.000.000	APBD		4 dok	500.000.000
5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Malinau	100%	100.000.000	APBD		100%	100.000.000
5.01.02.2.02.02	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Malinau	Masukan	-	APBD		Masukan	-
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Datadn Informasi Perencanaan pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Malinau	43 PD	50.000.000	APBD		43 PD	50.000.000



Rencana Kerja
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau
Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Malinau	1 buku	50.000.000	APBD		1 buku	50.000.000
5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah	Malinau	100%	225.000.000	APBD		100%	225.000.000
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Malinau	kerjasama	-	APBD		kerjasama	-
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Malinau	22 laporan	225.000.000	APBD		22 laporan	225.000.000
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata Capaian Pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Malinau	100%	770.000.000	APBD		100%	770.000.000
5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	Malinau	100%	270.000.000	APBD		100%	270.000.000
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Malinau	15 PD	20.000.000	APBD		PD	20.000.000
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Malinau	4 Lap	250.000.000	APBD		4 Lap	250.000.000
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata Capaian Pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan pembangunan daerah	Malinau	85%	250.000.000	APBD		85%	250.000.000



Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Malinau	100%	250.000.000	APBD		100%	250.000.000
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang diakomodir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKAPD)	Malinau	7 Dok	120.000.000	APBD		7 Dok	120.000.000
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkatdaerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang perekonomian	Malinau	7 PD	30.000.000	APBD		7 PD	30.000.000
5.01.03.2.02.03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitasdan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Malinau	7 PD	100.000.000	APBD		7 PD	100.000.000
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata Capaian Pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Malinau	100%	250.000.000	APBD		100%	250.000.000
5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Malinau	100%	250.000.000	APBD		100%	250.000.000
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitasdan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Malinau	1 lap	220.000.000	APBD		1 lap	220.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang infrastruktur	Jumlah perangkatdaerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang infrastruktur	Malinau	21 PD	30.000.000	APBD		21 PD	30.000.000



Rencana Kerja
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau
Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rata-Rata Capaian Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Malinau	100%	250.000.000	APBD		100%	250.000.000
5.05.02.2.01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Data Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diakses Ke Website	Malinau	100%	-	APBD		100%	250.000.000
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Malinau	1 Lap	250.000.000	APBD		1 Lap	100.000.000
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknplogi	Malinau	100%	200.000.000	APBD		100%	200.000.000
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Jumlah hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Malinau	1 Dok	200.000.000	APBD		1 Dok	100.000.000



BAB
IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Bappeda dan Litbang yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2024 terdapat 4 (Empat) program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) sub kegiatan, baik program/kegiatan/sub kegiatan utama yang



Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2024

merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program/kegiatan/sub kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Berikut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2024:



Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda dan Litbang Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6		7	8	9
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Capaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Malinau	100%	11.116.545.609	APBD		100%	11.116.545.609
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Malinau	100%	9.587.539.900	APBD		100%	9.587.539.900
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Malinau	54 org	9.587.539.900	APBD		54 org	9.587.539.900
5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Malinau	100%	300.000.000	APBD		100%	300.000.000
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Malinau	56 org	300.000.000	APBD		56 org	300.000.000
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Malinau	100%	681.330.009	APBD		100%	681.330.009
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Malinau	1 Paket	250.000.000	APBD		1 paket	250.000.000
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Malinau	1 Paket	100.000.000	APBD		1 paket	100.000.000
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Malinau	2 jns	-	APBD		2 jns	-
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah partisipasi rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Malinau	50 lap	680.760.009	APBD		50 Lap	680.760.009
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi sistem pemerintahan yang dapat digunakan	Malinau	1 aplikasi	70.000.000	APBD		1 aplikasi	70.000.000



Rencana Kerja
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau
Tahun 2024

5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Malinau	100%	477.675.700	APBD			150.000.00
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Malinau	8 Unit	-	APBD		8 Unit	-
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Malinau	1 Paket	150.000.000	APBD		1 Paket	150.000.000



Rencana Kerja
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau
Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Malinau	100%	100.000.000	APBD			100.000.000
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang pemeliharaan dan pajak kendaraan dibayarkan	Malinau	6 unit	100.000.000	APBD		6 unit	100.000.000
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata Capaian Pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Malinau	80%	1.250.100.000	APBD		85%	1.250.100.000
5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	Malinau	80%	975.100.000	APBD		85%	975.100.000
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	Malinau	1 BA	100.000.000	APBD		1 BA	100.000.000
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah berita acara forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	Malinau	43 BA	150.000.000	APBD		43 BA	150.000.000
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara musrenbang kab/kota	Malinau	1 BA	325.000.000	APBD		1 BA	325.000.000
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kab/kota yang ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Malinau	4 Dok	500.000.000	APBD		4 Dok	500.000.000
5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Malinau	80%	50.000.000	APBD		85%	50.000.000
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah buku LKPJ Bupati Malinau Tahun 2022	Malinau	43 PD	-	APBD		43 PD	-
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	Malinau	1 buku	50.000.000	APBD		1 buku	50.000.000



Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah	Malinau	80%	225.000.000	APBD		85%	225.000.000
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama daerah yang dikoordinasi pelaksanaannya	Malinau	12 laporan	-	APBD		12 laporan	-
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	Malinau	22 laporan	225.000.000	APBD		22 laporan	225.000.000
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata Capaian Pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Malinau	80%	770.000.000	APBD		85%	770.000.000
5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Malinau	80%	270.000.000	APBD		85%	270.000.000
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	Malinau	19 kali	-	APBD		19 kali	-
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Malinau	15 Pd	20.000.000	APBD		15 pd	30.000.000
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Rentra/Renja bidang pembangunan manusia	Malinau	4 Lap	250.000.000	APBD		4 Lap	250.000.000



Rencana Kerja
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau
Tahun 2024

5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	Malinau	1 laporan	-	APBD		1 laporan	-
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen OPD yang diasistensi bidang pembangunan manusia	Malinau	8 opd	-	APBD		8 opd	-



Rencana Kerja
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau
Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen data dan informasi integrasi intervensi pencegahan stunting	Malinau	5 Lap	-	APBD		4 Lap	-
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata Capaian Pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Malinau	80%	250.000.000	APBD		85%	250.000.000
5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Malinau	80%	250.000.000	APBD		85%	250.000.000
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD,RPJMD,RKPD)	Malinau	7 Dok	120.000.000	APBD		7 Dok	120.000.000
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen OPD yang diasistensi bidang perekonomian	Malinau	7 PD	30.000.000	APBD		7 PD	30.000.000
5.01.03.2.02.03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Malinau	7 PD	100.000.000	APBD		7 PD	100.000.000
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata Capaian Pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Malinau	80%	250.000.000	APBD		85%	250.000.000



Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Malinau	80%	250.000.000	APBD		85%	250.000.000
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen OPD yang diasistensi bidang infrastruktur	Malinau	21 PD	30.000.000	APBD		21 PD	30.000.000
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	Malinau	1 dok	-	APBD		1 dok	-
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen OPD yang diasistensi bidang kewilayahan	Malinau	11 dok	-	APBD		11 dok	-
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	Malinau	1 dok	-	APBD		1 dok	-
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Malinau	1 lap	220.000.000	APBD		1 lap	220.000.000
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rata-Rata Capaian Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Malinau	80%	250.000.000	APBD		85%	200.000.000
5.05.02.2.01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Data Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diakses Ke Website	Malinau	80%	250.000.000	APBD		85%	200.000.000



Rencana Kerja
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau
Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik	Malinau	1 dok	250.000.000	APBD			100.000.000
5.05.02.2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah	Malinau	80%	-	APBD		85%	-
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah hasil kelitbangan yang dilakukan diseminasi	Malinau	1 Lap	-	APBD		1 Lap	100.000.000



PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ditujukan sebagai pedoman pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Bappeda dan Litbang untuk tahun anggaran 2025 sehingga diperoleh peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Selain itu renja ini digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau. Renja Bappeda dan Litbang ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi, kerja keras dan bertanggungjawab.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil dan memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Malinau dalam mewujudkan *good governance* di lingkungan Bappeda dan Litbang, maka sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam renja ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Bappeda dan Litbang merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini.

Malinau, 7 Februari 2023
Kepala Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau

Drs. Agustinus, M.AP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670217 199312 1 001